

BAB II

KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN GARUT SEBELUM PERISTIWA ANTI TIONGHOA TAHUN 1963

2.1 Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Garut

2.2.1 Kondisi Demografi Kabupaten Garut

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1930 telah dilakukan sensus kependudukan dimana jumlah penduduk Kabupaten Garut pada saat itu berjumlah 33.612 orang. Populasi tersebut terdiri atas 31.373 penduduk bumiputra, 454 penduduk Eropa, 1.683 penduduk Tionghoa, serta 105 penduduk Timur Asing lainnya²¹. Data ini menunjukkan bahwa sejak masa Kolonial Belanda selain bumiputra etnis Tionghoa sudah banyak mendiami distrik Garut dan menjadi salah satu kelompok etnis yang ikut serta dalam membentuk komposisi demografi di Kabupaten Garut.

Peningkatan arus migrasi penduduk pendatang ke Kabupaten Garut, seperti etnis Tionghoa, Arab, Pakistan, dan India termasuk orang-orang Eropa seperti Inggris, Italia, dan Jerman, serta etnis Tionghoa terjadi sejak pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkan kawasan perkebunan di wilayah sekitar Gunung Papandayan, meliputi daerah Giriawas, Cikajang, Cisaruni, hingga Darajat. Pengembangan ini selanjutnya diperluas dengan budidaya komoditas perkebunan lainnya, khususnya teh, yang tersebar di wilayah Cilawu, Cisurupan, Cikajang, Pakenjeng, Cisompet, Pameungpeuk, Cikelet, dan sekitarnya²². Orang Belanda yang berjasa terhadap pembangunan perkebunan dan pertanian di Garut adalah K.F Holle yang datang ke Kabupaten Garut sekitar pertengahan tahun 1800 dengan membuka perkebunan teh, kina, dan karet.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada jumlah penduduk secara keseluruhan, tetapi juga menunjukkan adanya pluralitas dalam komposisi masyarakat. Kehadiran berbagai kelompok pendatang sejak mas

²¹ *Ibid.*, hlm. 17.

²² Anggapraja, S. (1984). *Sejarah Garut dari Masa ke Masa*. hlm. 146.

kolonial menjadikan masyarakat Garut memiliki keragaman etnis yang cukup menonjol. Masuknya berbagai kelompok pendatang sejak masa kolonial baik dari etnis Tionghoa, Arab, India, China yang membentuk keragaman sosial yang kian terlihat pada dekade-dekade berikutnya. Pluralitas tersebut kemudian menjadi ciri khas masyarakat Garut, di mana interaksi antar-etnis berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, budaya, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan sensus kependudukan yang dilakukan pada tahun 1955, kelompok etnis Tionghoa tercatat sebagai kelompok pendatang yang paling banyak menetap di Kabupaten Garut dibandingkan dengan kelompok etnis asing lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis di Kabupaten Garut Tahun 1955²³

Etnis	Jumlah Penduduk
Tionghoa	3.981
Eropa	141
Arab	41

Data tersebut menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Garut, khususnya dalam sektor perdagangan dan kegiatan usaha di kawasan perkotaan. Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Priangan Timur, Kabupaten Garut merupakan daerah dengan jumlah penduduk asing terbanyak pada masa tersebut. Jumlah penduduk asing di Garut mencapai 3.981 orang, diikuti oleh Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.894 orang dan Kabupaten Ciamis sebanyak 1.181 orang²⁴. Kondisi ini menunjukkan bahwa Garut menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan yang cukup berkembang sehingga menarik banyak pendatang dari berbagai latar belakang etnis untuk menetap dan menjalankan kegiatan usaha di daerah Garut.

Selain menunjukkan keberagaman etnis, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Garut juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

²³ Hidayat, A. A. (2021). *Loc. cit.*

²⁴ *Ibid.*,

Pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kelahiran yang relatif tinggi di kalangan masyarakat bumiputra serta adanya arus migrasi penduduk dari berbagai daerah yang datang untuk menetap di Garut. Keberadaan pusat pemerintahan daerah, aktivitas perkebunan, serta berkembangnya wilayah perkotaan menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah yang cukup menarik bagi para pendatang untuk tinggal dan membangun kehidupan baru. Adanya pembukaan perkebunan diikuti pula oleh pembangunan beberapa hotel-hotel di daerah Garut sebagai sarana tempat menginap dan hiburan bagi para pegawai perkebunan atau para wisatawan yang datang dari luar negeri. Beberapa hotel yang dibangun pada tahun 1917 adalah Hotel Papandayan, Hotel Vila Dolce, Hotel Belvedere, Hotel Van Hegel. Kemudian beberapa hotel yang terletak bukan di daerah pusat kota Garut antara lain Hotel Cisurupan di daerah Cisurupan, Hotel Malayu di Tarogong, Hotel Kamojang di Samarang, Hotel Cilaut Eureun di daerah Pameungpeuk.²⁵

Perkembangan jumlah penduduk ini juga diikuti dengan meluasnya wilayah permukiman masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Garut. Jika pada awalnya konsentrasi penduduk lebih banyak berada di wilayah pusat kota dan daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan, maka seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, wilayah permukiman mulai berkembang ke daerah-daerah lain seperti kawasan pedesaan yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Hal ini menyebabkan persebaran penduduk di Kabupaten Garut menjadi semakin luas dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan saja.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan tanah yang cukup subur. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Garut cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan sehingga mampu menopang kehidupan masyarakat yang terus bertambah. Banyak masyarakat yang membuka lahan pertanian baru di berbagai wilayah seperti daerah kaki gunung maupun dataran tinggi yang memiliki kesuburan tanah yang baik untuk bercocok tanam.

²⁵ Anggapraja. *Op. cit.* hlm. 167.

2.2.2 Kondisi Sosial Kabupaten Garut

Kondisi sosial masyarakat Garut menunjukkan karakter masyarakat agraris, dimana kehidupan sosial masyarakat sebagian besar berpusat di wilayah perdesaan, dengan rasa solidaritas yang kuat berbasis pada hubungan kekerabatan, adat, dan tradisi budaya Sunda. Pola kehidupan sosial yang ditandai oleh nilai gotong royong, terutama dalam aktivitas pertanian, pembangunan fasilitas desa, serta kegiatan keagamaan. Pada tahun 1930 jumlah keseluruhan etnis sunda di Garut mencapai 97% dibandingkan etnis lain yang hidup di Kabupaten Garut²⁶. Kondisi tersebut menjadikan struktur sosial dan pola interaksi masyarakat Garut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan tradisi budaya Sunda yang mengakar kuat.

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang paling dominan digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Sunda, khususnya dialek Priangan. Ciri khas masyarakat Garut tercermin dalam sikap ramah, santun, dan lembut, yang terwujud melalui norma-norma tutur dalam Bahasa Sunda. Meskipun sistem bahasa Sunda mengenal *undak usuk basa* atau tingkatan tutur bahasa yang terdiri dari basa loma (informal), basa panengah (tengah), basa lemes (halus atau sopan) yang penggunaannya tetap hidup dan melekat dalam interaksi sosial sehari-hari sekaligus menjadi penanda identitas kultural masyarakat Garut.²⁷

Sebagian besar masyarakat Sunda menganut agama Islam, yang kemudian membentuk corak kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Garut yang kuat dan mengakar. Nilai-nilai keislaman tidak hanya tercermin dalam praktik ibadah sehari-hari, tetapi juga terintegrasi dalam norma sosial, adat istiadat, serta pola interaksi antarwarga. Tradisi sosial budaya yang berdasarkan pengaruh ajaran agama Islam yang berkembang dalam masyarakat Garut yaitu seperti pupujian, selamatan, dan pengajian. Tradisi pupujian merupakan tradisi lisan bernuansa keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Priangan termasuk Kabupaten Garut.²⁸

²⁶ Sofianto. *Op. cit.* hlm. 17.

²⁷ Salsa, S. B. A. Z., Abdullah, M. N. A., Morimoto, E., & Wilodati, W. (2025). *Undak Usuk Basa as a Reflection of Social Hierarchy in Sundanese Communication*. ALMAARIEF. hlm. 107.

²⁸ Masduki, A. (2009). *Puisi Pupujian Dalam Bahasa Sunda*. Patanjala: *Journal of Historical and Cultural Research*, 1(1). hlm. 56.

Kabupaten Garut dikenal sebagai wilayah yang bercorak agraris, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian sebagai petani. Perkembangan pola mata pencaharian masyarakat Kabupaten Garut perlahan mengalami perubahan sejak pertengahan tahun 1950-an.²⁹ Masyarakat bumiputra mulai mengalami pergeseran mata pencaharian dengan bekerja sebagai buruh di sektor industri. Pada masa itu terdapat Pabrik Tenun Garut (PTG) yang dikenal sebagai salah satu pabrik kain tenun terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja di pabrik-pabrik milik pengusaha etnis Tionghoa, serta di industri rumahan lokal milik bumiputra, salah satunya adalah usaha dodol yang kemudian dikenal luas sebagai Dodol Picnic.

Sebagian besar masyarakat bumiputra lainnya mulai beralih ke sektor perdagangan, meskipun masih dalam skala kecil, seperti membuka warung di lingkungan kampung, menjadi pedagang kaki lima, berdagang di pasar, maupun berjualan secara keliling. Meskipun terdapat upaya memasuki sektor perdagangan, para pedagang bumiputra umumnya menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan usaha mereka kurang berkembang. Salah satu faktor utama adalah persaingan yang cukup kuat dari pedagang etnis Tionghoa yang telah lebih dahulu menguasai sektor perdagangan, terutama di wilayah Garut Kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, pada sekitar tahun 1960 mulai muncul variasi mata pencaharian lain di kalangan masyarakat bumiputra, seperti bekerja sebagai pegawai negeri, khususnya guru dan anggota tentara. Di samping itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai karyawan, sopir, dan tukang becak sebagai alternatif sumber penghasilan di luar sektor pertanian.³⁰

Masyarakat sunda pada umumnya merupakan masyarakat yang mudah berbaur karena sifat keramah tamahannya, khususnya masyarakat Garut yang pada saat itu sudah hidup berdampingan dan berbaur dengan etnis pendatang yang beragama Islam yaitu etnis Padang, Jawa, Arab, Pakistan yang dengan mudah melebur dengan tradisi Sunda melalui hubungan sosial dan tradisi keagamaan. Para

²⁹ Sofianto. *Op. Cit.* hlm. 108.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

pendatang baru khususnya orang Arab dan Pakistan yang keberadaan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat lokal karena keterbukaan dalam berinteraksi dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial bersama bumiputra, sehingga tidak adanya jarak sosial antara bumiputra dan etnis Arab dan Pakistan.

Berbanding terbalik dengan interaksi antara bumiputra dengan etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas terbanyak di Kabupaten Garut akan tetapi hubungan mereka dengan bumiputra tidak berjalan dengan harmonis dan hanya sekadar hubungan pekerjaan saja.³¹ Perbedaan latar belakang budaya, sistem kepercayaan, serta pola kehidupan sosial menjadi faktor utama yang membatasi intensitas interaksi antara kedua kelompok. Selain itu, etnis Tionghoa hidup dalam lingkungan sosial yang terpisah, terutama dalam aktivitas ekonomi dan permukiman, sehingga memperkuat jarak sosial dengan masyarakat bumiputra. Etnis Tionghoa tinggal mengelompok di kawasan Pecinan yang berada di kawasan *Pengkolan* atau yang berada di sepanjang jalan Ahmad Yani hingga Jalan Guntur. Kehidupan mereka yang tertutup hingga sekolah dan kuburan mereka terpisah dari masyarakat bumiputra yang mengakibatkan adanya jurang pemisah antara etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra pada saat itu.

2.2.3 Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Garut

Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut berada dalam keadaan yang tidak stabil. Berbagai upaya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi belum dapat berjalan dengan baik karena sebagian besar potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat lebih difokuskan pada perjuangan politik dan militer dalam mempertahankan kemerdekaan. Situasi tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat tidak dapat berkembang secara normal. Walaupun berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang penuh ketidakpastian, masyarakat Garut tetap menunjukkan semangat solidaritas yang tinggi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Banyak masyarakat yang memberikan bantuan kepada para pejuang berupa makanan, pakaian, serta berbagai

³¹ Sofianto, Nugrahanto, Yuniadi & Falah. *Op. Cit.* hlm. 183.

kebutuhan lainnya³². Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat bumiputra, tetapi juga datang dari berbagai kelompok masyarakat lain dari beragam latar belakang etnis yang turut berpartisipasi membantu para pejuang yang berada di wilayah Garut.

Kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat pada masa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah kembalinya tentara Belanda ke Indonesia melalui serangan militer yang terjadi pada tahun 1947 hingga 1948. Serangan tersebut merupakan bagian dari upaya Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dampak dari agresi militer tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Garut. Pada masa terjadinya serangan militer tersebut, banyak fasilitas penting di wilayah perkotaan yang mengalami kerusakan bahkan kehancuran. Berbagai bangunan seperti hotel dan pabrik tidak luput dari dampak konflik yang terjadi.³³

Hancurnya berbagai fasilitas ekonomi tersebut menyebabkan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian, khususnya para buruh yang sebelumnya bekerja di pabrik maupun sektor jasa di wilayah perkotaan. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan pertanian. Kondisi keamanan yang tidak menentu memaksa banyak penduduk meninggalkan lahan pertanian mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, banyak lahan pertanian yang tidak dapat digarap secara optimal sehingga produksi hasil pertanian mengalami penurunan.

Keadaan tersebut menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat Garut pada masa awal kemerdekaan berada dalam kondisi yang sangat berat. Tidak hanya itu, gangguan juga muncul dari gerombolan DI/TII yang sudah berlangsung selama 13 tahun yaitu dari tahun 1949 hingga 1962. Gerombolan DI/TII ini memiliki basis pertahanan di Limbangan, Malangbong, Cibat, Pameungpeuk, Samarang dan Cikajang.³⁴ Adanya serangan dari gerombolan DI/TII ini kondisi ekonomi semakin

³² Sofianto, *Op. Cit.* hlm. 107.

³³ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁴ Imadudin, I. (2010). *Peranan Kiai Dan Pesantren Cipari Garut Menghadapi DI/TII (1948-1962)*. Patanjala: *Journal of Historical and Cultural Research*, 2(1). hlm. 58.

tidak menentu karena gerombolan sering kali melakukan kekerasan, merampas harta penduduk, membakar kampung, bahkan tidak segan-segan membunuh penduduk.

Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Garut pada periode pasca-kemerdekaan hingga tahun 1963 tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian nasional Indonesia yang sedang mengalami berbagai tekanan dan perubahan struktural. Perubahan besar dalam sistem politik Indonesia terjadi setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno.³⁵ Dekrit tersebut menandai berakhirnya sistem Demokrasi Liberal dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, negara memegang kendali yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Pemerintah berupaya mengarahkan perekonomian nasional melalui konsep ekonomi terpimpin, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi asing yang dianggap sebagai warisan kolonial.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ekonomi terpimpin menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu permasalahan utama adalah menurunnya aktivitas perdagangan luar negeri, khususnya di sektor ekspor dan impor. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti memburuknya hubungan ekonomi internasional, lemahnya kapasitas produksi dalam negeri, serta kebijakan ekonomi yang cenderung tertutup, hal ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat dan berdampak pada meningkatnya defisit negara. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya pengeluaran pemerintah untuk kepentingan politik dan proyek-proyek besar pada masa Demokrasi Terpimpin.

Untuk mengatasi defisit anggaran yang semakin membesar, pemerintah mengambil langkah dengan mencetak dan mengedarkan uang dalam jumlah besar.

³⁵ Ramli & Sumiyatun, S. (2017). *Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)*. SWARNADWIPA: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya, 1(3). hlm. 172.

Kebijakan ini memang memberikan solusi jangka pendek dalam menutup kekurangan keuangan negara, namun dalam jangka panjang justru menimbulkan masalah baru. Jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat pesat tanpa diimbangi oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Akibatnya, laju inflasi menjadi tidak terkendali dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam sepanjang awal hingga pertengahan 1960-an. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis dan memperburuk situasi ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Garut.³⁶

Dampak dari kebijakan ekonomi nasional yang ditandai dengan tingginya laju inflasi tersebut tidak hanya tercermin dalam indikator makroekonomi, tetapi juga sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga yang tidak terkendali serta menurunnya daya beli menyebabkan semakin sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi pada tahun 1960 telah mencapai tingkat yang memengaruhi aspek paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk nyata dari kesulitan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam distribusi kebutuhan energi rumah tangga.

Kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi inflasi kala itu merembet dampaknya hingga ke daerah-daerah lainnya, khususnya Kabupaten Garut. Sulitnya mendapat bahan pokok makanan seperti beras dan minyak tercermin dalam pembelian minyak tanah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Garut, masyarakat harus mengantre dan menunjukkan kartu keluarga sebagai syarat pembelian. Jumlah minyak tanah yang dapat diperoleh pun dibatasi, yaitu hanya sekitar tiga hingga empat liter untuk setiap keluarga³⁷. Di sisi lain, meskipun pada masa itu terjadi kenaikan upah hingga sepuluh kali lipat, peningkatan tersebut tidak mampu mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok yang bahkan mencapai hampir sepuluh kali lipat. Situasi ini semakin mempertegas

³⁶ Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries*. London: Macmillan. hlm. 230.

³⁷ Hidayat, A. A. (2024). *Op. Cit.* hlm. 73.

beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, di mana peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat akibat inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi di tingkat lokal tetap berlangsung dan bahkan menunjukkan dinamika tersendiri. Salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut pada dekade 1960-an adalah kawasan *Pengkolan* yang berkembang sebagai pusat perdagangan utama. Keberadaan kawasan ini memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi lokal terbentuk serta bagaimana berbagai kelompok masyarakat berperan dalam aktivitas perdagangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 1960-an kawasan *Pengkolan* merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Garut yang berada di sekitar Jl. Ahmad Yani, Jl. Ciledug, Jl. Guntur dan Jl. Pasar Baru, di mana sebagian besar usaha pertokoan didominasi oleh orang-orang Tionghoa. Jenis usaha yang dijalankan oleh pedagang Tionghoa juga menunjukkan pola pengelompokan berdasarkan lokasi. Di sepanjang Jl. Ahmad Yani, Jl. Ciledug, dan Jl. Cikuray, sebagian besar toko menjual kain, pakaian, perhiasan, serta barang-barang elektronik. Sementara itu, di sekitar Jl. Guntur dan Jl. Pasar Baru lebih banyak dijumpai usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan makanan pokok.³⁸

Dominasi pedagang etnis Tionghoa dalam sektor perdagangan di Garut Kota pada masa itu terlihat sangat kuat. Tercatat bahwa jumlah toko yang dimiliki oleh masyarakat bumiputra masih sangat terbatas, bahkan hanya terdapat satu toko besar milik bumiputra, yaitu Toko Merdeka. Toko ini didirikan oleh pasangan suami istri, Umar dan Hj. Uji, sejak tahun 1962 dan tetap bertahan hingga masa berikutnya. Toko Merdeka pada saat itu telah berkembang menjadi salah satu toko yang cukup besar dengan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan, hingga sepatu, sehingga mampu bersaing dengan toko-toko milik pedagang Tionghoa lainnya.³⁹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan sektor perdagangan antara masyarakat bumiputra dan kelompok pendatang,

³⁸ Sofianto, *Op. Cit.* hlm. 108.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

khususnya etnis Tionghoa, di kawasan pusat ekonomi Garut. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam hal akses terhadap modal, jaringan distribusi, dan pengalaman usaha, tetapi juga memperlihatkan adanya struktur ekonomi yang tidak seimbang yang telah terbentuk sejak masa kolonial dan terus berlanjut pada masa awal kemerdekaan. Dalam struktur tersebut, masyarakat bumiputra cenderung berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha berskala kecil. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami tekanan akibat inflasi tinggi pada awal 1960-an, ketimpangan ini menjadi semakin terasa. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang memadai menyebabkan beban ekonomi masyarakat bumiputra semakin berat. Sementara itu, kelompok pedagang yang memiliki modal dan jaringan yang lebih kuat relatif lebih mampu bertahan dalam situasi krisis. Perbedaan kemampuan bertahan ini secara tidak langsung memperlebar jarak ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Ketimpangan ekonomi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat bumiputra. Perasaan ketidakadilan dalam akses ekonomi, ditambah dengan tekanan hidup yang semakin berat, dapat memicu munculnya sentimen negatif terhadap kelompok yang dianggap lebih dominan dalam perekonomian. Dalam konteks ini, kondisi ekonomi tidak hanya menjadi persoalan kesejahteraan semata, tetapi juga berperan sebagai faktor yang memperbesar potensi terjadinya ketegangan sosial. Oleh karena itu, dinamika ekonomi di kawasan *Pengkolan* pada masa tersebut dapat dipahami sebagai salah satu latar belakang penting dalam melihat munculnya konflik sosial di Kabupaten Garut pada periode berikutnya.

2.2 Kehidupan Etnis Tionghoa di Kabupaten Garut

2.2.1 Kedatangan Etnis Tionghoa di Kabupaten Garut

Kedatangan imigran dari etnis Tionghoa ke Priangan terjadi pada abad ke-19 seiring dengan pesatnya perkembangan Batavia sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi kolonial. Pada tahun 1884 dibangun jalur kereta api yang menghubungkan Batavia hingga ke wilayah-wilayah Priangan sehingga memudahkan mobilisasi

orang Tionghoa untuk berpindah tempat.⁴⁰ Selain itu, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1872 memberikan izin pemukiman bagi etnis Tionghoa di wilayah Priangan yang memungkinkan mereka untuk menetap secara permanen dan mengembangkan perdagangannya. Para imigran Tionghoa yang datang ke Kabupaten Garut harus menaati peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Para imigran yang datang ke Kabupaten Garut terdiri dari suku bangsa Hokkien, Teo-Chiu, Hakka (Khek), dan Kanton yang berasal dari Provinsi Fukien dan Kwangtung. Para imigran Tionghoa yang datang ke Kabupaten Garut harus menaati peraturan seperti *passen-stelsel* yaitu sistem surat jalan yang mengharuskan orang Tionghoa memiliki izin resmi apabila hendak bepergian atau berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lain. Peraturan ini diberlakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap mobilitas penduduk Tionghoa, terutama yang terlibat dalam aktivitas perdagangan antardaerah.⁴¹

Keberadaan etnis Tionghoa di Kabupaten Garut jika dilihat dari bukti fisik yaitu berupa tempat ibadah Klenteng *Hok Liong Bio* yang berlokasi di Jalan Guntur dan sudah didirikan pada tahun 1838.⁴² Berdasarkan hal itu, dapat diambil kesimpulan bahwa etnis Tionghoa di Kabupaten Garut sudah ada sebelum didirikannya Klenteng *Hok Liong Bio*. Selain itu, pemerintah Kolonial Belanda mengangkat seorang *Wijkmeester* yang berfungsi sebagai pencatatan sipil administrasi. Kantor *Wijkmeester* sudah ada sejak tahun 1920 dimana seorang BKNya adalah Tan Chin Liong yang sekretarisnya berasal dari kaum bumiputra yaitu Kang Ulis, kantor *Wijkmeester* berada di Jl.Holle atau sekarang Jl, Mandalagiri.

Keberadaan etnis Tionghoa di Kabupaten Garut merupakan bagian dari proses migrasi panjang yang tidak terlepas dari dinamika ekonomi regional dan kebijakan kolonial. Perpindahan mereka dari wilayah pesisir ke pedalaman seperti Priangan menunjukkan adanya perluasan jaringan perdagangan yang didorong oleh

⁴⁰ Ariwibowo, G. A. (2015). *Wisata Alam di Keresidenan Priangan pada Periode Akhir Kolonial (1830-1942)*. Patanjala, 7(3). hlm. 405.

⁴¹ "Sudah Ada Sejak Tahun 1895: Kelompok Etnis Cina di Kota Garut" dalam *Pikiran Rakyat*, 16 Mei 2000.

kebutuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api serta kebijakan izin pemukiman menjadi faktor penting yang mempercepat integrasi wilayah pedalaman ke dalam sistem ekonomi kolonial, sekaligus membuka ruang bagi etnis Tionghoa untuk berperan sebagai penggerak aktivitas perdagangan di tingkat lokal.

Di samping itu, kebijakan kolonial yang mengatur mobilitas dan kehidupan sosial masyarakat Tionghoa menunjukkan adanya pola kontrol yang ketat terhadap kelompok ini. Sistem seperti *passen-stelsel* dan lembaga Wijkmeester mencerminkan upaya pemerintah kolonial dalam mengawasi sekaligus memanfaatkan peran ekonomi etnis Tionghoa. Dengan demikian, posisi masyarakat Tionghoa di Garut dapat dipahami sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, namun tetap berada dalam batasan struktural yang ditentukan oleh kekuasaan kolonial.

2.2.2 Pemukiman Etnis Tionghoa di Kabupaten Garut

Pemukiman Etnis Tionghoa memperoleh izin pembukaan pemukiman pada tahun 1872. Berdasarkan peta yang dibuat oleh pemerintah kolonial, keberadaan permukiman Tionghoa di Garut telah tercatat sejak tahun 1895.⁴³ Pada masa itu, kawasan pemukiman mereka berlokasi di daerah Ciwalen atau Sukaregang Hilir. Penempatan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kolonial yang secara sengaja memisahkan permukiman etnis Tionghoa dari masyarakat bumiputra. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mencegah terbentuknya kesatuan politik di antara kelompok masyarakat di Garut. Namun demikian, kebijakan ini seringkali menimbulkan persepsi negatif di kalangan bumiputra, yang menganggap bahwa etnis Tionghoa cenderung hidup secara eksklusif dan mengelompok.

Berbeda dengan pemukiman-pemukiman orang Tionghoa di kawasan lain yang menggunakan prinsip *feng shui*. Kawasan pecinan orang Tionghoa yang ada di Kabupaten Garut tidak menggunakan prinsip *feng shui* sebagai perencanaan tata

⁴³ *Ibid.*,

wilayahnya.⁴⁴ hal ini sejalan dengan segregasi pemukiman yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda melalui *Regering Reglement* tahun 1907 yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan rasial, yaitu golongan Eropa (*Europeanen*), golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan golongan Bumiputra (*Inlanders*)⁴⁵. Adanya pemisahan rasial sejak zaman kolonial Belanda ini berdampak luas terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pola pemukiman, akses pendidikan, jenis pekerjaan, serta hubungan sosial antar etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra.

Penempatan permukiman etnis Tionghoa di Kabupaten Garut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari rekayasa politik kolonial yang bersifat segregatif. Pemisahan tempat tinggal ini secara tidak langsung menciptakan jarak sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra, yang kemudian melahirkan prasangka dan stereotip antarkelompok. Dengan demikian, anggapan bahwa etnis Tionghoa hidup secara tertutup sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari pilihan mereka sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur kebijakan kolonial yang membatasi interaksi sosial dan integrasi antarmasyarakat.

Pada tahun 1920 hingga 1930 orang-orang Tionghoa di Kabupaten Garut mulai berangsur-angsur melakukan perpindahan yang awalnya pemukiman mereka berada di kawasan Sukaregang Hilir berpindah ke kawasan *Pengkolan* yang berada di sepanjang Jl. Ahmad Yani, Jl. Ciledug, Jl. Pasar Baru dan Jl. Guntur yang kemudian membentuk kawasan pecinan di sekitar jalan tersebut⁴⁶. Perpindahan pemukiman tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Faktor yang mendorong mobilitas ini adalah perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Tionghoa yaitu penghapusan beberapa kebijakan yang sebelumnya diberlakukan terhadap etnis Tionghoa, seperti kewajiban memiliki surat jalan (*passenstelsel*) serta sistem pemukiman khusus bagi orang Tionghoa (*wijkenstelsel*).

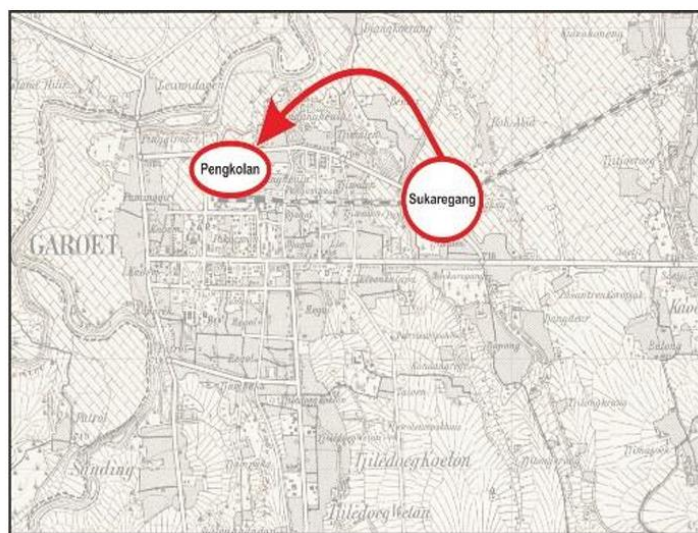
⁴⁴ Hidayat, A. A. (2015). *Loc. cit.* hlm. 74.

⁴⁵ Muntholib, A. (2008). *Melacak akar rasialisme di Indonesia dalam perspektif historis*. In *Forum Ilmu Sosial*. 5(2). hlm. 106.

⁴⁶ Sofianto, Nugrahanto, Yuniadi & Falah. *Op. Cit.* hlm. 182.

Dengan dihapuskannya peraturan tersebut, masyarakat Tionghoa memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk menentukan tempat tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di luar kawasan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Alasan lain perpindahan mereka ke kawasan *Pengkolan* adalah untuk menyambung hidup dengan berdagang karena pada saat itu kawasan sekitar *Pengkolan* merupakan tempat yang sangat strategis untuk melakukan usaha, serta di kawasan pemukiman sebelumnya yaitu di Ciwalen atau Sukaregang Hilir sudah tidak dapat menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat.⁴⁷

Gambar 1. Peta Perpindahan Pemukiman Etnis Tionghoa di Kabupaten Garut⁴⁸



Pola pemukiman masyarakat Tionghoa yang terkonsentrasi di pusat kota Garut menunjukkan adanya hubungan yang bersifat fungsional antara tempat tinggal dengan aktivitas ekonomi mereka⁴⁹. Pemilihan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan pusat perdagangan memudahkan masyarakat Tionghoa untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Kondisi ini pada akhirnya mendorong terbentuknya pemukiman yang mengelompok di kawasan tertentu, terutama di sekitar wilayah *Pengkolan* yang menjadi pusat kegiatan ekonomi kota Garut. Perpindahan ini dapat dikatakan pula sebagai strategi orang-orang Tionghoa di

⁴⁷ “Sudah Ada Sejak Tahun 1895: Kelompok Etnis Cina di Kota Garut” dalam *Pikiran Rakyat*, 16 Mei 2000

⁴⁸ Direkonstruksi dari Garoet, 1909. *Collectie Kaarten van Nederlandsch Koloniaal*. Inv. Nr. KIT 542201. Leiden: UBL dalam Sofianto, Nugrahanto, Yuniadi & Falah. *Op. Cit.* hlm. 177.

⁴⁹ Sofianto, Nugrahanto, Yuniadi & Falah. *Op. Cit.* hlm. 183.

Kabupaten Garut untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar dan mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Meskipun kawasan *Pengkolan* dikenal sebagai wilayah pemukiman masyarakat Tionghoa, pola penataan ruang di kawasan tersebut menunjukkan adanya pembagian yang cukup jelas. Sebagian besar rumah milik masyarakat Tionghoa berada di sepanjang jalur jalan utama yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha atau toko. Sementara itu, bagian belakang dari deretan bangunan tersebut umumnya dihuni oleh masyarakat bumiputra.⁵⁰ Pola ini mencerminkan struktur sosial perkotaan yang terbentuk pada masa kolonial, di mana aktivitas ekonomi, pemukiman, dan interaksi sosial diatur secara tidak langsung oleh struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah kolonial.

Selain bermukim di kawasan *Pengkolan*, sebagian etnis Tionghoa juga tercatat memiliki tempat tinggal di sejumlah ruas jalan lain, seperti Jalan Papandayan, Jalan Siliwangi, Jalan Cikuray, dan Jalan Cimanuk⁵¹. Namun, keberadaan mereka di wilayah-wilayah tersebut tidak membentuk pemukiman yang mengelompok sebagaimana di kawasan *Pengkolan* dan dapat dikatakan pula meskipun mereka berada di wilayah yang berbeda dengan kawasan pecinan yang ada di *Pengkolan* akan tetapi mereka tetap tidak berbaur dengan masyarakat bumiputra.

Seperti kawasan pecinan lainnya yang terdapat di berbagai kota di Indonesia, kawasan pecinan di Garut juga memiliki ruang-ruang publik yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat Tionghoa, seperti tempat ibadah, dan sekolah. Hal ini sejalan dengan adat istiadat masyarakat Tionghoa tradisional, dimana di setiap perantauan mereka berupaya untuk membangun sarana-sarana bersama yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga mendukung keberlangsungan sosial dan kultural mereka.

Pendirian tempat ibadah mereka yaitu Klenteng yang dipandang sebagai fondasi penting dalam kehidupan karena berfungsi sebagai pusat penghormatan kepada leluhur, pemujaan dewa-dewa pelindung, serta sarana memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Pada tahun 1838 etnis Tionghoa di Kabupaten

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

⁵¹ *Ibid.*,

Garut mendirikan Klenteng *Hok Liong Bio* yang berada di Jalan Guntung bersebelahan dengan pusat perbelanjaan Garut Plaza. Klenteng *Hok Liong Bio* merupakan tempat ibadah bagi etnis Tionghoa di Kota Garut dimana ini merupakan satu-satunya klenteng yang ada di Kota Garut. Klenteng ini memuja Dewi Kwan Im, sebetulnya ada beberapa dewa yang ada di Klenteng *Hok Liong Bio* seperti, Dewa Bhumi (*Ong Pek Kong*) dan Dewa Perang (*Guan Yu*).⁵²

Selain tempat peribadatan etnis Tionghoa di Garut mempunyai sekolah dan tempat pemakaman yang terpisah dari masyarakat bumiputra. Dalam bidang pendidikan, masyarakat Tionghoa mendirikan sekolah khusus, di antaranya Tionghoa Hwee Koan (THHK) yang berlokasi di Jalan Gunung Payung serta Sekolah Rakyat Partikulir di Jalan Ciledug. Perkembangan pendidikan tersebut berlanjut hingga tahun 1953 dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daya Susila di Jalan Ahmad Yani.⁵³ Sekolah-sekolah ini didirikan untuk menampung lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama. Kemudian terdapat pula tempat pemakaman etnis Tionghoa (Santiong) yang berlokasi di wilayah Gugunungan, yang berjarak tiga kilometer dari pusat Kota Garut, dan terpisah dari area pemakaman masyarakat bumiputra.

Terbentuknya kawasan pecinan di Kecamatan Garut Kota memperlihatkan bagaimana ruang sosial dan budaya berkembang seiring dengan konsentrasi pemukiman. Pembangunan sarana umum seperti klenteng, sekolah, dan tempat pemakaman yang terpisah menunjukkan adanya upaya mempertahankan identitas kultural sekaligus memenuhi kebutuhan komunitas secara mandiri. Namun, kondisi ini juga berimplikasi pada terbentuknya batas-batas sosial yang relatif tegas antara etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra. Meskipun interaksi ekonomi tetap berlangsung, pemisahan dalam aspek permukiman dan fasilitas sosial mencirikan bahwa integrasi sosial tidak sepenuhnya terjadi, sehingga pola kehidupan masyarakat di Garut pada masa itu cenderung mencerminkan struktur masyarakat majemuk yang tersegmentasi.

⁵² Sofianto, *Op. Cit.* hlm. 50.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 136.

2.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Kabupaten Garut

Kehidupan sosial ekonomi etnis Tionghoa di Kabupaten Garut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kepercayaan dan praktik keagamaan yang mereka anut, yang turut membentuk pola interaksi sosial serta aktivitas keseharian dalam komunitasnya. Aspek religius menjadi salah satu unsur penting yang mencerminkan identitas kultural sekaligus memengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat Tionghoa di wilayah tersebut. Dalam hal keagamaan, masyarakat Tionghoa di Kota Garut pada umumnya memeluk kepercayaan tradisional Tionghoa. Mereka secara rutin mendatangi kelenteng *Hok Liong Bio* khususnya setiap tanggal 1 dan 15 berdasarkan penanggalan Tionghoa.⁵⁴

Di dalam kelenteng tersebut terdapat dua ruang utama, yaitu ruang *Toa Pek Kong* yang berisi patung *Toa Pek Kong* atau *Hok Tek Ceng Sien* sebagai Dewa Tanah, patung *Ma Cho Po* sebagai Dewa Keselamatan, patung *Chay Chen Kong* sebagai Dewa Keberuntungan atau rezeki, serta patung dan gambar harimau Prabu Siliwangi dan kai kaboa. Sementara itu, ruang kedua yang disebut ruang *Koan Kong* memuat patung *Koan Kong* sebagai Dewa Keadilan dan Kebenaran, patung *Lam Kek Sian Kong* sebagai Dewa Kesehatan dan Panjang Umur, serta patung Mbah Jugo dari Gunung Kawi yang dipercaya sebagai Dewa Kesugihan.⁵⁵

Keberadaan patung serta gambar harimau yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi yang ditempatkan di bawah patung *Toa Pek Kong* hal ini menarik perhatian karena patung dan gambar tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga diberi sesaji berupa bahan mentah seperti daging, telur, dan tahu. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Tionghoa penganut kepercayaan tradisional di Kota Garut turut menghormati sosok Prabu Siliwangi, yang diyakini memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan serta keberkahan dalam kehidupan. Dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja besar dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang memiliki kharisma dan kesaktian, sehingga sosoknya sering dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual dan perlindungan.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

⁵⁵ *Ibid.*,

Selain itu, praktik keagamaan masyarakat Tionghoa di Kabupaten Garut juga tercermin dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang oleh masyarakat bumiputra dikenal sebagai Pabaru Cina yang diperingati setiap tanggal 1 bulan pertama dalam kalender Tionghoa. Pada malam pergantian tahun, tepatnya sekitar pukul 24.00 atau menjelang pagi hari, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk melaksanakan ritual yang disebut *soja*. Ritual ini dilakukan dengan cara mengepalkan tangan kiri yang menggenggam tangan kanan, sementara kedua ibu jari diposisikan secara khusus sebagai bentuk penghormatan dan doa.⁵⁶

Tradisi tersebut tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan serta solidaritas dalam komunitas. Perayaan Imlek menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sosial, baik di dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks kehidupan sosial di Garut, perayaan ini juga mencerminkan adanya interaksi budaya antara masyarakat Tionghoa dan bumiputra, yang terlihat dari penggunaan istilah lokal serta keterlibatan masyarakat sekitar dalam suasana perayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial ekonomi etnis Tionghoa tidak berdiri secara terpisah, melainkan berbaur dan beradaptasi dengan budaya lokal yang berkembang di Kabupaten Garut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan religius masyarakat Tionghoa di Garut tidak hanya berperan sebagai bentuk ekspresi spiritual, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas ekonomi mereka. Nilai-nilai seperti etos kerja, ketekunan, solidaritas keluarga, serta keuletan dalam berusaha menjadi landasan penting dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga nilai-nilai tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan usaha dari generasi ke generasi. Dengan demikian, praktik keagamaan yang berpadu dengan kehidupan sosial dalam komunitas Tionghoa turut berperan dalam membentuk pola mata pencaharian mereka di Kabupaten Garut.

Mata pencaharian masyarakat Tionghoa di Kabupaten Garut pada umumnya berfokus pada kegiatan perdagangan. Meski demikian, tidak sedikit pula yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

menekuni bidang lain di luar sektor tersebut. Sejak masa kolonial Belanda, telah terdapat orang-orang Tionghoa yang bekerja sebagai tenaga profesional, seperti dokter dan guru.⁵⁷ Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, etnis Tionghoa memiliki peran penting sebagai *leveransir* atau pemasok barang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial. Mereka bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan perkebunan, bahan pangan, hingga barang konsumsi untuk mendukung administrasi dan militer. Beberapa toko yang berperan sebagai pemasok antara lain Toko Ek Bouw milik Thio Tiang Tjin (Babah Gemuk) yang menyediakan kebutuhan pokok seperti gula, garam, kopi, minyak, tepung, dan daging. Selain itu, terdapat Toko Batavia milik Tan Tiang Tjin yang menjual beras serta perlengkapan olahraga, serta Toko Khoe Pek Goan milik Khoe Pek Goan yang dikenal menyediakan roti dan kue.⁵⁸

Kelompok masyarakat Tionghoa yang tidak memperoleh penunjukan sebagai *leveransir* tetap aktif dalam kegiatan perdagangan, terutama dengan menjual berbagai kebutuhan seperti bahan pangan, kain, pakaian, hingga perhiasan. Salah satunya adalah Toko Bandung yang berlokasi di Jl. *Chineesche voor Straat*, milik Yo Hong Gan, yang menyediakan beragam kebutuhan sandang sekaligus menjadi distributor sarung cap Padi hasil produksi *Preanger Bont Weverij*. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang bergerak di bidang industri, seperti Kim Song yang mendirikan pabrik kecap di Jl. *Groete Weg* (kini dikenal sebagai Bengkel Honda Motor Ultra Jaya), dengan produk kecap cap Potret, Ikan Koki, dan cap Cemara yang cukup populer dan diminati, khususnya di wilayah Garut Kota.⁵⁹

Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan orang-orang Tionghoa sebagai perantara dalam hubungan ekonomi antara pihak kolonial dan penduduk bumiputra. Adanya peran sebagai *leveransir* inilah yang secara bertahap mengubah secara perlahan mata pencaharian orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia menjadi seorang pedagang. Dalam prosesnya, penduduk bumiputra menjual hasil produksi mereka kepada pedagang Tionghoa, yang kemudian menyalurkannya kepada para

⁵⁷ “Sudah Ada Sejak Tahun 1895: Kelompok Etnis Cina di Kota Garut” dalam *Pikiran Rakyat*, 16 Mei 2000

⁵⁸ Sofianto. *Op. Cit.* hlm. 38.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 39.

pedagang grosir Belanda. Pola ini juga berlangsung sebaliknya, di mana barang-barang impor milik Belanda didistribusikan kepada masyarakat bumiputra melalui perantara pedagang Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa khususnya yang bermukim di Kabupaten Garut, pada umumnya menekuni mata pencaharian di bidang perdagangan. Pada masa Orde Lama sebagian besar usaha yang dimiliki etnis Tionghoa semakin terkonsentrasi di kawasan *Pengkolan* hal ini diakibatkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 (PP No. 10/1959) yang melarang warga negara asing untuk menjalankan kegiatan perdagangan eceran di wilayah pedesaan.⁶⁰ Berdasarkan PP No. 10/1959 perusahaan-perusahaan kecil dan eceran milik orang asing yang berada di luar kota Daerah Swatantra tingkat I dan II harus sudah tutup selambat-lambatnya pertanggal 1 Januari 1960 dengan catatan bahwa terhitung mulai tanggal berlakunya PP ini diambil langkah-langkah likuidasi.⁶¹

Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1959 menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat Garut bahwa kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari Soekarno dan pihak militer (TNI), sehingga memicu anggapan bahwa pengusiran orang-orang Tionghoa (Hoakiau) dari wilayah pedesaan merupakan langkah yang dibenarkan, terutama karena mereka dipandang sebagai penguasa ekonomi. Dampak nyata dari kebijakan ini terlihat pada penutupan warung-warung milik orang Tionghoa di pedesaan serta pemindahan mereka ke ibu kota kabupaten (Swatantra II).

Peristiwa tersebut oleh masyarakat Garut dikenal sebagai “*beset Cina hiji*” yaitu rangkaian tindakan yang berkaitan dengan penerapan PP No. 10 Tahun 1959 yang terjadi sekitar bulan Januari 1960 di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut, seperti Cikajang, Banyuresmi (kemungkinan Bayongbong), Wanaraja, Cibat, dan Leles.⁶² Pada masa itu, penutupan usaha milik orang Tionghoa dilakukan oleh aparat tentara dengan dukungan kelompok masyarakat, khususnya kalangan

⁶⁰ Benny G. Setiono. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. hlm. 792.

⁶¹ PP.10. 1959 Bab II, Pasal 2 Ayat 1 tentang Likwidasi Perusahaan Perdagangan Kecil/Eceran Asing.

⁶² Wawancara dengan KH. Ohan Burhan (79 tahun, pelaku beset Cina hiji, dan kerusuhan anti Cina Mei 1963), Misbah (73 tahun, pelaku sejarah), dan Amir Syarifudin (76 tahun, pelaku sejarah) pada tanggal 3 Januari 2011 dalam Hidayat, A. A. (2015). *Op. cit.* hlm. 113.

pemuda. Dalam peristiwa ini, sebagian masyarakat bumiputra merasa memperoleh keuntungan, karena mereka dapat membeli barang-barang berharga milik orang Tionghoa dengan harga yang relatif lebih murah.

Kondisi ini turut memperkuat konsentrasi pemukiman dan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di pusat kota, khususnya di sekitar Jalan Ahmad Yani, Jalan Ciledug, Jalan Pasar Baru, dan Jalan Guntur. Akibatnya, sektor perdagangan di pusat kota semakin didominasi oleh pedagang Tionghoa, sementara akses ekonomi mereka di wilayah pedesaan semakin terbatas. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan semakin terkonsentrasinya wilayah pemukiman dan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di pusat Kota Garut, yang kemudian berkembang menjadi kawasan pecinan. Kebijakan PP No. 10/1959 secara tidak langsung mendorong terbentuknya pola pemusatan ruang, di mana pedagang Tionghoa memilih menetap dan membuka usaha di lokasi-lokasi strategis yang berdekatan dengan pasar, jalur distribusi, serta pusat aktivitas ekonomi kota yang berada di sekitar Jl. Ahmad Yani, Jl. Ciledug, Jl. Cikuray, Jl. Pasar Baru dan Jl. Guntur.

Jenis barang yang diperdagangkan oleh orang-orang Tionghoa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu barang elektronik serta kebutuhan pokok atau bahan makanan. Pembagian jenis usaha tersebut selanjutnya tersebar dan terpusat di beberapa ruas jalan tertentu, sesuai dengan karakteristik komoditas yang diperdagangkan. Jenis barang yang diperdagangkan di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ciledug, Jalan Siliwangi, dan Jalan Cikuray didominasi oleh komoditas non-pangan, seperti barang elektronik, perhiasan, pakaian, serta arloji. Sementara itu, aktivitas perdagangan di Jalan Pasar Baru, Jalan Guntur, dan Jalan Mandalagiri lebih banyak berfokus pada penjualan bahan makanan, terutama kebutuhan dapur dan sembilan bahan pokok (sembako).

Selain berkiprah dalam sektor perdagangan, sebagian orang-orang Tionghoa juga mengembangkan usaha di bidang industri pabrik dan penggilingan padi. Sejumlah pabrik beroperasi di sekitar kawasan Pengkolan, antara lain pabrik pengolahan aci yang berlokasi di Jalan Ciledug dan Jalan Bratayudha, pabrik tenun di Jalan Ciwalen, pabrik cokelat di Jalan Cimanuk, pabrik minyak sereh di kawasan Samarang, serta pabrik sabun yang berada di Jalan Ciledug. Di samping itu, banyak

juga orang Tionghoa yang membuka usaha penggilingan padi di Kabupaten Garut, yang kebanyakan berada di wilayah Sukaregang.⁶³ Berikut adalah rincian pabrik-pabrik yang dimiliki etnis Tionghoa di Kabupaten Garut:

Tabel 2.2 Jumlah Pabrik Milik Etnis Tionghoa⁶⁴

No	Nama Pabrik	Jumlah
1.	Pabrik Aci	2 buah
2.	Pabrik Tenun	9 buah
3.	Pabrik Coklat	1 buah
4.	Pabrik Sabun Nansen	1 buah
5.	Pabrik Kecap	2 buah
6.	Pabrik Tahu	4 buah
7.	Pabrik Roti	2 buah
8.	Pabrik Kerupuk	2 buah
9.	Pabrik Beras	11 Buah
10.	Pabrik Minyak Wangi Sereh	47 buah
11.	Pabrik Teh	3 buah
12.	Pabrik Sale Buah Kesemek	1 buah

Meskipun sebagian besar orang-orang Tionghoa di Kabupaten Garut menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perdagangan, terdapat pula sebagian kecil yang berkiprah sebagai tenaga profesional, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Beberapa tokoh Tionghoa tercatat bekerja sebagai dokter, seperti Lim, serta sebagai guru, antara lain Go Bachtiar yang dikenal pula dengan nama Yo Liang Kie, Tjhi Atji, dan Liam Kiam She. Sebetulnya banyak dari orang-orang Tionghoa yang mempunyai keinginan untuk bekerja di sektor lain seperti menjadi pegawai negeri sipil atau bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 126.

⁶⁴ Hidayat, A. A. (2015). *Op. cit.* hlm. 125.

⁶⁵ “Sudah Ada Sejak Tahun 1895: Kelompok Etnis Cina di Kota Garut” dalam *Pikiran Rakyat*, 16 Mei 2000

Perkembangan usaha pedagang Tionghoa mengalami kemajuan hingga mencapai kesuksesan yang ditunjang oleh beberapa faktor strategis, antara lain pengalaman panjang dalam dunia perdagangan sejak masa kolonial, kemampuan membangun jaringan dagang serta keuletan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan ekonomi yang terus berubah. Selain itu, pemusatan usaha di kawasan pusat kota yaitu kawasan *Pengkolan* memberikan keuntungan tersendiri karena kedekatannya dengan pasar, jalur transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga memperlancar arus barang dan transaksi perdagangan.

Dalam perspektif teori konflik sosial Coser, konflik dapat muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, distribusi sumber daya, dan kesempatan yang dianggap tidak seimbang oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁶⁶ Ketimpangan ekonomi antara etnis Tionghoa dan bumiputra menimbulkan rasa ketidakpuasan serta kecemburuan sosial yang kemudian berkembang menjadi sentimen negatif terhadap kelompok yang dipandang lebih dominan secara ekonomi. Coser juga menjelaskan bahwa konflik sering kali muncul melalui proses identifikasi kelompok (*group identification*), yaitu ketika suatu kelompok mempertegas identitasnya dengan membedakan diri dari kelompok lain yang dianggap sebagai sumber masalah.⁶⁷ Dalam kerusuhan anti Tionghoa di Garut tahun 1963 identitas bumiputra dan Tionghoa semakin dipertentangkan akibat kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketegangan yang semula bersifat laten berkembang menjadi konflik terbuka berupa aksi penjarahan dan pengrusakan terhadap toko-toko serta usaha milik masyarakat Tionghoa.

Tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi terlihat dari berbagai aset yang sudah dimiliki oleh orang-orang Tionghoa seperti memiliki rumah, toko, kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi tersebut apabila dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat bumiputra, perbedaan tersebut terlihat cukup mencolok dan mencerminkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi. Situasi ini kemudian memunculkan sentimen negatif dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat

⁶⁶ Coser, L. A. *Op.Cit.* hlm. 8-11.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 87-92.

bumiputra terhadap etnis Tionghoa. Ketegangan tersebut semakin diperparah oleh kondisi ekonomi nasional yang tengah mengalami krisis pada tahun 1963, sehingga pada akhirnya memicu terjadinya kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut.

2.3 Pembauran Sosial Etnis Tionghoa dan Bumiputra di Kabupaten Garut.

Pembauran sosial antara etnis Tionghoa dan bumiputra di Kabupaten Garut merupakan proses yang berlangsung secara bertahap sejak masa kolonial hingga setelah Indonesia merdeka. Kehadiran masyarakat Tionghoa di Garut tidak hanya berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga turut berinteraksi dengan masyarakat bumiputra dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut menciptakan hubungan sosial yang relatif harmonis dan mendorong terjadinya integrasi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Garut.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pembauran sosial adalah bidang pendidikan. Setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat Tionghoa tidak hanya menampung siswa keturunan Tionghoa, tetapi juga siswa bumiputra. Sekolah Rakyat Partikulier menjadi sekolah campuran yang diikuti oleh siswa Tionghoa dan bumiputra dari kalangan menengah ke atas. Sekolah ini kemudian berkembang menjadi Sekolah Daya Susila, yang menggunakan Bahasa Indonesia sesuai kebijakan pemerintah. Untuk jenjang pendidikan lanjutan, didirikan SMP Daya Susila dan SMP THHK pada tahun 1953. Untuk mendukung pembiayaan pendidikan THHK, masyarakat Tionghoa mendirikan Bioskop *Chung Hwa Hwee*.⁶⁸

Pada tahun 1950 muncul Sekolah Cina Pin Min yang berhaluan pro-Taiwan, sedangkan THHK lebih dekat dengan Tiongkok daratan. Perbedaan ideologi ini menimbulkan persaingan antarsekolah, tetapi tidak sampai menimbulkan konflik fisik. Sekolah Pin Min akhirnya ditutup pemerintah pada tahun 1958 karena dikaitkan dengan dukungan Taiwan terhadap pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk pendidikan tingkat SMA, masyarakat Tionghoa di Garut umumnya

⁶⁸ Sofianto, Nugrahanto, Yuniadi & Falah. *Op. Cit.* hlm. 179-180.

melanjutkan sekolah ke Bandung atau Jakarta karena belum tersedia sekolah khusus Tionghoa di Garut. Pada tahun 1963 didirikan SMA Katolik (SMAK) yang terbuka bagi siswa Tionghoa dan bumiputra.⁶⁹

Bagi masyarakat Tionghoa, khususnya yang telah berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) keberadaan SMA Katolik (SMAK) menjadi salah satu sarana penting untuk mempererat hubungan dengan masyarakat bumiputra. Komposisi siswa yang relatif seimbang antara etnis Tionghoa dan bumiputra menciptakan lingkungan pergaulan yang akrab, baik di dalam maupun di luar sekolah. Hubungan tersebut terlihat dari kebiasaan para siswa yang saling berkunjung ke rumah masing-masing, suatu bentuk interaksi yang sebelumnya jarang terjadi antara generasi muda dari kedua kelompok etnis. Melalui aktivitas tersebut, hubungan sosial antara etnis Tionghoa dan bumiputra menjadi semakin dekat dan terbuka. Namun, sekolah ini akhirnya ditutup sekitar tahun 1998 karena jumlah siswa yang terus menurun. Salah satu penyebabnya adalah banyak keluarga Tionghoa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke Bandung sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta.

Penggunaan Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan juga menjadi salah satu sarana penting dalam proses pembauran sosial. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan mendorong generasi muda Tionghoa untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat luas. Bahasa Indonesia kemudian menjadi media komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan sosial, memperkuat rasa kebangsaan, dan mengurangi jarak sosial antara masyarakat Tionghoa dan bumiputra.⁷⁰

Meskipun proses pembauran sosial antara etnis Tionghoa dan bumiputra di Kabupaten Garut telah berlangsung dalam berbagai bidang kehidupan, proses tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu faktor yang menjadi penghalang pembauran adalah masih adanya batasan dalam hubungan sosial antara

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Sofianto. *Op.Cit.* hlm 136.

kedua kelompok, khususnya dalam bidang perkawinan. Perkawinan campuran antara etnis Tionghoa dan bumiputra masih relatif jarang terjadi karena adanya perbedaan nilai budaya, tradisi keluarga, serta pertimbangan sosial yang dianut oleh masing-masing kelompok, terutama kekhawatiran sebagian perempuan Tionghoa terhadap praktik poligami yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perkawinan antaretnis belum menjadi fenomena yang umum pada masa itu.

Selain faktor perkawinan, pola pemukiman juga turut memengaruhi proses pembauran. Sebagian masyarakat Tionghoa cenderung tinggal secara berkelompok di kawasan *Pengkolan* yang sejak masa kolonial telah menjadi pusat aktivitas perdagangan dan ekonomi. Pola permukiman yang relatif terpisah dari masyarakat bumiputra menyebabkan intensitas interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang lebih dekat di luar aktivitas ekonomi menjadi lebih sedikit. Keberadaan kawasan *Pengkolan* sebagai pusat permukiman dan perdagangan masyarakat Tionghoa sebenarnya merupakan warisan kebijakan kolonial yang mengelompokkan penduduk berdasarkan etnis. Meskipun setelah kemerdekaan pembatasan tersebut tidak lagi diberlakukan, pola pemukiman yang telah terbentuk sejak lama tetap bertahan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Garut. Akibatnya, interaksi antara masyarakat Tionghoa dan bumiputra lebih sering terjadi dalam konteks perdagangan dan kegiatan ekonomi dibandingkan dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Konsentrasi permukiman di kawasan *Pengkolan* juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat Tionghoa untuk mempertahankan identitas budaya, nilai-nilai keluarga, serta jaringan sosial antarsesama etnis. Kedekatan tempat tinggal memudahkan mereka untuk saling membantu dalam kegiatan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Namun, kondisi tersebut secara tidak langsung menciptakan batas sosial yang membuat proses pembauran dengan masyarakat bumiputra berlangsung lebih lambat. Meskipun demikian, batas-batas tersebut tidak sepenuhnya menghalangi terjadinya interaksi antaretnis. Aktivitas perdagangan,

pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial di ruang publik tetap mempertemukan masyarakat Tionghoa dan bumiputra. Seiring berkembangnya kota dan meningkatnya mobilitas penduduk, hubungan antara kedua kelompok menjadi semakin terbuka. Oleh karena itu, meskipun pola pemukiman yang terpisah menjadi salah satu faktor penghambat pembauran sosial, faktor tersebut tidak sepenuhnya menghambat terbentuknya hubungan yang harmonis antara etnis Tionghoa dan bumiputra di Kabupaten Garut.⁷¹

Faktor ekonomi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembauran sosial. Aktivitas perdagangan yang melibatkan masyarakat Tionghoa dan bumiputra menciptakan hubungan yang saling membutuhkan. Masyarakat Tionghoa umumnya berperan sebagai pedagang, pengusaha, atau pemilik usaha, sedangkan masyarakat bumiputra berperan sebagai konsumen, pekerja, maupun mitra usaha. Hubungan ekonomi tersebut mendorong terciptanya interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan menjadi salah satu jembatan penting dalam membangun hubungan antaretnis.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya pembauran sosial. Penggunaan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menjadi sarana penting dalam memperlancar komunikasi antara etnis Tionghoa dan bumiputra. Kemampuan berbahasa yang sama memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intensif sehingga dapat mengurangi jarak sosial di antara kedua kelompok. Seiring berkembangnya penggunaan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda Tionghoa, penggunaan bahasa Mandarin semakin berkurang dan hanya dipertahankan oleh sebagian generasi tua.⁷²

Namun demikian, upaya pembauran yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Sikap eksklusif yang masih melekat pada sebagian masyarakat Tionghoa menimbulkan anggapan di kalangan bumiputra bahwa kelompok tersebut kurang terbuka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Sebaliknya, prasangka dan stereotip yang berkembang di kalangan bumiputra

⁷¹ Sofianto, Nugrahanto, Yuniadi & Falah. *Op. Cit.* hlm. 182.

⁷² Sofianto. *Op.Cit.* hlm 136.

terhadap masyarakat Tionghoa juga menjadi hambatan dalam proses pembauran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembauran sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kesediaan satu kelompok untuk beradaptasi, tetapi juga membutuhkan sikap saling menerima dari kedua belah pihak.

Hubungan antara etnis Tionghoa dan bumiputra pada umumnya lebih banyak terjalin dalam bentuk hubungan fungsional. Masyarakat Tionghoa membutuhkan tenaga kerja, pelanggan, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi dari masyarakat bumiputra. Sebaliknya, masyarakat bumiputra juga bergantung pada jaringan perdagangan dan kesempatan kerja yang tersedia di lingkungan usaha milik etnis Tionghoa. Hubungan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi tersebut memang mampu menciptakan interaksi yang berkelanjutan, namun belum sepenuhnya menghilangkan batas-batas sosial yang masih ada di antara kedua kelompok.⁷³

Dengan demikian, pembauran sosial etnis Tionghoa dan bumiputra di Kabupaten Garut merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Faktor bahasa, pendidikan, dan ekonomi menjadi unsur utama yang mendukung terjadinya integrasi sosial, sedangkan perbedaan budaya, pola pemukiman, dan masih adanya prasangka sosial menjadi faktor yang menghambat proses pembauran. Meskipun belum mencapai pembauran secara menyeluruh, hubungan yang terjalin antara kedua kelompok menunjukkan adanya upaya untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat multietnis di Kabupaten Garut.
